

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Maret 2020 s.d sekarang menjadi masalah serius yang dihadapi dunia internasional termasuk Indonesia. Peningkatan kasus Covid-19 di seluruh dunia berdampak kepada ekonomi masyarakat dan tentunya kepada ekonomi secara nasional dan internasional. Dampak signifikan terhadap ekonomi masyarakat pastinya akan menyebabkan pendapatan negara berkurang secara drastis, dari segi perpajakan juga mengalami penurunan yang signifikan. Tidak hanya pajak pusat dan pajak daerah, retribusi daerah juga mengalami penurunan.

Pada tahun 2021, ada beberapa penelitian yang membahas mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap pajak kendaraan bermotor di akhir tahun 2020. Untuk meneliti dampak pandemi Covid-19 terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah Provinsi Jawa Tengah maka diadakan analisis oleh Nugraha (2021) mengenai efektivitas program pemutihan di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kemudian ada penelitian mengenai tinjauan efektivitas program pemutihan dan keringanan Pajak Kendaraan Bermotor pada masa pandemi Covid-19 di Provinsi Sumatera Selatan oleh Mirza (2021). Hasil dari penelitian-penelitian ini adalah

melihat dampak dari adanya program pemutihan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Namun demikian dengan adanya pandemi Covid-19 tentunya berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah tidak terkecuali Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di wilayah DKI Jakarta. Adanya pandemi ini telah mengakibatkan perubahan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya wilayah DKI Jakarta dalam menanggulangi pandemi covid-19 sekaligus memperbaiki pemasukan terhadap pajak daerahnya. Contohnya seperti kebijakan pembatasan mobilitas di DKI Jakarta seperti PSBB dan PPKM yang membuat berbagai perusahaan tidak dapat menjalankan bisnisnya semaksimal mungkin dan mengharuskan perusahaan melakukan PHK terhadap karyawan demi mengurangi pengeluaran perusahaan. Banyaknya masyarakat yang terdampak akan pembatasan mobilitas dan pengurangan pegawai akan membuat penghasilan masyarakat itu sendiri berkurang dan tidak mempunyai kemampuan untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

Menurut Rasyid (2020), penerimaan pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp8,84 triliun. Berdasarkan Tabel I-1, pada tahun 2020 penerimaan pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta berjumlah Rp7,9 triliun. Dapat dilihat bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta mengalami penurunan sekitar 900 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2019.

Tabel I-1 Tabel Penerimaan PKB 2020

NO	BULAN	Penerimaan
1	JANUARI	702.013.390.265
2	FEBRUARI	666.653.242.845
3	MARET	659.856.207.991
4	APRIL	439.971.694.005
5	MEI	501.721.291.114
6	JUNI	753.380.185.615
7	JULI	724.546.444.437
8	AGUSTUS	653.836.160.578
9	SEPTEMBER	719.193.218.879
10	OKTOBER	628.892.672.089
11	NOVEMBER	727.704.899.334
12	DESEMBER	701.454.077.316
	Total	7.879.223.484.468

Sumber : Bapenda DKI Jakarta

Dari data tersebut kita dapat melihat bahwa pendapatan dari pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta sangatlah besar. Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian keuangan, total dari penerimaan asli daerah DKI Jakarta pada tahun 2020 adalah sebesar Rp37,41 Triliun dan pajak daerah menyumbang sebesar Rp31,89 Triliun. (Kementerian Keuangan, 2021).

Dari sejumlah pajak daerah yang diterima, pajak kendaraan bermotor menyumbang sebesar 21,05% terhadap pendapatan asli daerah. Jumlah ini sama dengan seperlima pendapatan asli daerah di DKI Jakarta pada tahun 2020. Dari sejumlah pajak kendaraan bermotor yang diterima, realisasi pendapatan dari pajak

kendaraan bermotor belum mencapai 100%, artinya dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor masih ada Wajib Pajak yang tidak patuh akan pembayaran pajak kendaraannya.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis ingin mengetahui dampak pandemi Covid-19 terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Penulis akan melakukan tinjauan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan tingkat kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotornya.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah untuk KTTA berjudul “Dampak Pandemi Covid-19 pada Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta.” Adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pajak kendaraan bermotor berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah di wilayah DKI Jakarta?
2. Bagaimana dampak pandemi Covid-19 terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2021 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya?
3. Bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat akan pembayaran pajak kendaraan bermotor di masa pandemi Covid-19?

1.3 Tujuan Penulisan

Sementara itu, tujuan dari penulisan KTTA ini adalah untuk:

1. Mengetahui kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah dan manfaatnya terhadap masyarakat.

2. Mengetahui jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor akibat dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2021.
3. Mengetahui tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor akibat pandemi Covid-19.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan dibatasi pada analisis penerimaan pajak kendaraan bermotor di wilayah DKI Jakarta pada tahun 2020 dan 2021 agar dapat melihat perbandingan penerimaannya pada tahun tersebut akibat dari pandemi Covid-19. Ruang lingkup penulisan juga dibatasi pada tingkat kepatuhan masyarakat akan pembayaran pajak kendaraan bermotornya.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan KTTA ini adalah:

1. Mengetahui tingkat kepatuhan masyarakat akan pembayaran terhadap pajak kendaraan bermotor akibat dampak dari pandemi Covid-19.
2. Dapat mengetahui anomali yang terjadi akibat pandemi Covid-19 terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di wilayah DKI Jakarta
3. Dapat meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan bagaimana penjelasan atau gambaran umum penulisan Karya Tulis Tugas Akhir yang berisikan latar belakang dan menulis tentang

permasalahan akibat objek terkait. Bab ini juga membahas tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, metode yang dipakai dalam pengumpulan data, dan sistematika penulisan yang digunakan untuk menulis Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang informasi dan teori-teori yang digunakan dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini. Teori yang terkait adalah teori mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dasar hukum, dan teori-teori lainnya yang dapat menunjang penelitian dan analisis dalam membahas permasalahan dan objek yang terkait dengan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan mengenai pembahasan secara menyeluruh terkait dengan permasalahan dari objek Karya Tulis Tugas Akhir ini. Penulisan di bab ini berdasar kepada data dan informasi yang dikumpul oleh penulis melalui studi kepustakaan dan lapangan. Penulis juga melakukan penelitian terhadap data dan informasi yang ada berdasarkan teori dan dasar hukum yang berlaku.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan dari hasil analisis dan penelitian yang dibahas oleh penulis pada bab-bab sebelumnya. Bab ini juga memberikan saran dan masukan kepada pihak terkait dengan maksud membangun dan dapat bermanfaat untuk pihak-pihak terkait.